

Pendidikan Perempuan dan Yayasan Kartini Di Jawa Pada Masa Kolonial

Gustiyan Ningsih^{1*)}, Taufik²⁾, & Huddy Husin³⁾

^{1,2,3}Universitas Indraprasta, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of the research is to describe the implementation of the Ethical Policy in the Dutch East Indies and its impact on Education in the Dutch East Indies; To describe the thoughts and ideas of R.A. Kartini on the conditions and education of women in Java during the colonial period; To describe the development of education and the existence of the Kartini Foundation for women in Java during the end of colonial rule; Based on the results of the research: 1) That the implementation of the Ethical Policy in the Dutch East Indies at the end of the 19th century to the beginning of the 20th century displayed a paradoxical face; 2) That R.A. Kartini's thoughts on women's education were present as a voice of liberation that touched the deepest recesses of Javanese women's lives in the colonial era.; 3) That the existence of the Kartini Foundation and the schools it manages are clear evidence of how an idea can transcend geographical and cultural boundaries.

Key Words: Women's Education; Kartini Foundation; Colonial Era Education.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menjabarkan pelaksanaan kebijakan politik Etis di Hindia-Belanda dan dampaknya terhadap Pendidikan di Hindia Belanda; Untuk menjabarkan pemikiran dan gagasan R.A. Kartini terhadap keadaan dan pendidikan perempuan di Jawa masa kolonial; Untuk menjabarkan perkembangan pendidikan dan keberadaan Yayasan Kartini bagi kaum perempuan di Jawa pada masa akhir pemerintahan kolonial; Berdasarkan Hasil penelitian: 1) Bahwa pelaksanaan Politik Etis di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menampilkan wajah yang paradoks; 2) Bahwa pemikiran R.A. Kartini tentang pendidikan perempuan hadir sebagai suara pembebasan yang menyentuh relung paling dalam kehidupan perempuan Jawa di era kolonial.; 3) Bahwa keberadaan Yayasan Kartini dan sekolah-sekolah yang dikelolanya menjadi bukti nyata bagaimana sebuah ide dapat melampaui batas geografis dan kultural.

Kata Kunci: Pendidikan Wanita; Yayasan Kartini; Pendidikan Masa Kolonial.

Penulis Korespondensi: (1) Gustiyan Ningsih, (2) Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia, (3) Jl. Nangka No. 58 C, Tanjung Barat. Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, (4) Email: 08tiyanningsih@gmail.com

Copyright © 2026. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Raden Ajeng Kartini, yang lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, merupakan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah perjuangan emansipasi perempuan Indonesia. Ia berasal dari kalangan priyayi Jawa, putri dari Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, seorang bupati yang bekerja dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda. Keberadaan Kartini dalam lingkungan elit priyayi yang telah berasimilasi dengan nilai-nilai Belanda memberinya akses ke pendidikan dasar, suatu hal yang sangat langka bagi perempuan pribumi pada masa itu (Sukanti, 2012: 40). Kesempatan ini menjadi awal mula bagi Kartini untuk memupuk pemikiran kritis tentang peran perempuan dan pentingnya pendidikan.

Pendidikan yang diperoleh Kartini hingga usia dua belas tahun terhenti karena adat pingitan yang mewajibkan anak perempuan priyayi untuk tinggal di rumah dan menanti dijodohkan. Namun, selama masa pingitan, Kartini tidak berhenti belajar. Ia membaca buku-buku berbahasa Belanda, majalah Eropa, dan menjalin korespondensi dengan teman-teman Belandanya, termasuk Rosa Abendanon, istri pejabat tinggi Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Melalui surat-surat ini, Kartini menyuarakan pemikirannya tentang kondisi perempuan Jawa, ketidakadilan sosial, dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan (Kartini, 2004: 16).

Kumpulan surat-surat Kartini yang kemudian diterbitkan dalam buku "*Door Duisternis tot Licht*" (Habis Gelap Terbitlah Terang) menjadi cerminan dari pergolakan intelektual dan semangat reformis yang tumbuh dalam dirinya. Dalam tulisannya, ia menyoroti bagaimana budaya patriarkal dan sistem kolonial sama-sama menindas perempuan, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan. Ia menolak anggapan bahwa perempuan cukup hanya berperan dalam urusan domestik, dan menyatakan bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara intelektual dan moral (Cote, 2005: 11).

Kartini bukan hanya pelopor gerakan emansipasi perempuan dalam konteks kolonial, tetapi juga representasi dari pergeseran wacana sosial di Hindia Belanda menuju kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan. Dalam banyak suratnya, ia mengutarakan impiannya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi, yang pada saat itu masih sangat jarang. Bagi Kartini, pendidikan adalah fondasi utama bagi transformasi masyarakat, dan perempuan memiliki peran sentral dalam membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak (Ricklefs, 2008: 187).

Perjuangan Kartini dalam memajukan pendidikan perempuan tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah bagian dari konteks sosial-politik Hindia Belanda yang sedang mengalami transisi. Di satu sisi, pemerintah kolonial mulai membuka ruang terbatas untuk pendidikan kaum pribumi sebagai bagian dari politik etis; di sisi lain, masyarakat Jawa masih kuat memegang adat istiadat yang membatasi ruang gerak perempuan. Dalam situasi ini, gagasan-gagasan Kartini menjadi jembatan antara modernitas dan tradisi, serta antara kolonialisme dan nasionalisme yang sedang tumbuh (Blackburn, 2004: 66). Pemikiran Kartini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan perempuan di Hindia Belanda. Setelah kematiannya pada tahun 1904, sejumlah tokoh Belanda yang terinspirasi oleh gagasannya, termasuk Abendanon, mendirikan sekolah-sekolah Kartini di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta.

Sekolah-sekolah ini menjadi tempat penting bagi perempuan pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal, dan sekaligus menjadi ruang reproduksi nilai-nilai emansipatoris yang diperjuangkan Kartini (Wieringa, 1995: 32). Sekolah-sekolah Kartini memainkan peran penting dalam memperluas cakrawala perempuan pribumi terhadap dunia luar, meskipun masih terbatas bagi kalangan tertentu. Kurikulum yang diajarkan dalam sekolah-sekolah ini pada umumnya

mencakup keterampilan dasar, membaca, menulis, dan pelajaran tata krama. Walaupun belum mencapai konsep pendidikan kritis yang dibayangkan Kartini, keberadaan institusi-institusi tersebut memberikan dasar penting bagi kelangsungan pendidikan perempuan di Indonesia pada masa kolonial (Locher-Scholten, 2000: 71).

Selain dari lembaga formal, pemikiran Kartini juga berdampak pada lahirnya kesadaran kolektif di kalangan perempuan pribumi dan kalangan elit terdidik. Kartini berhasil menanamkan gagasan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan sosial jika diberikan akses terhadap ilmu pengetahuan. Ide ini kemudian diteruskan oleh organisasi-organisasi perempuan awal abad ke-20 seperti Putri Mardika, Aisyiyah, dan lainnya yang menjadikan pendidikan sebagai agenda utama dalam perjuangan mereka (Hatley, 1990: 29).

Dalam banyak tulisannya, Kartini menekankan pentingnya pendidikan yang tidak sekadar mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga membentuk watak, logika, dan moralitas perempuan. Bagi Kartini, pendidikan harus mampu membebaskan manusia dari ketertindasan, baik dalam bentuk ketidaktahuan maupun kekuasaan yang menindas. Dalam salah satu suratnya, ia menulis: "Saya ingin melihat anak perempuan bumiputera dapat memperoleh pendidikan, tidak untuk menjadikannya orang Eropa, tetapi untuk menjadikannya lebih manusiawi" (Kartini, 2004: 105).

Kartini juga memandang bahwa pendidikan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi kaum perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ia menekankan bahwa perempuan yang terdidik akan menjadi ibu yang lebih baik, yang mampu mendidik anak-anaknya dengan lebih baik pula. Dalam pandangan ini, perempuan bukan sekadar pendidik dalam keluarga, tetapi juga penjaga nilai dan pembentuk karakter bangsa (Sukanti, 2012: 79).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003: 95-100). Pendekatan yang digunakan adalah sejarah lokal dan pendidikan perempuan, dengan fokus pada analisis tentang hak mendapatkan pendidikan bagi perempuan pada masa kolonial Belanda.

Tahap pertama, heuristik atau pengumpulan sumber, dilakukan melalui penelusuran berbagai jenis sumber sejarah. Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip kolonial yang terdokumentasi dalam laporan administratif Hindia Belanda mengenai politik etis, serta dokumen Mencari bundel Surat-surat Kartini (edisi lengkap *Door Duisternis tot Licht*). Mencari arsip Yayasan Kartini (Kartini-Stichting) yang didirikan oleh Conrad Theodore van Deventer pada 1912. Mencari Staatsblad (Lembaran Negara) kolonial yang mengatur tentang izin pendirian sekolah swasta untuk perempuan. Mencari artikel koran sezaman seperti *De Locomotief* atau *Bataviaasche Nieuwsblad* yang meliput peresmian Sekolah Kartini di Semarang atau Jakarta.

Sumber sekunder Buku-buku sejarah pendidikan seperti karya **C. Papanek** atau **Frances Gouda** yang membahas posisi perempuan dalam kolonialisme. Jurnal-jurnal sejarah yang membahas *Politik Etis* dan dampaknya bagi kaum pribumi.

Tahap kedua, kritik sumber, dilakukan untuk menguji otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal dilakukan dengan meneliti bahan, bentuk, dan gaya penulisan sumber, khususnya terhadap dokumen-dokumen kolonial dan naskah kuno yang rentan terhadap interpolasi. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap ketiga, interpretasi, Di sini Anda merangkai fakta-fakta yang sudah lolos uji menjadi satu pemahaman yang logis. Analisis (Mengurai): Memisahkan data berdasarkan kategori, misalnya: Kurikulum yang diajarkan (seperti menjahit, memasak, baca-tulis), latar belakang sosial siswi (apakah hanya untuk ningrat atau rakyat biasa), dan kendala pendanaan yayasan. Sintesis (Menyatukan): Menghubungkan antara cita-cita Kartini dalam suratnya dengan realisasi sekolah yang dibangun oleh Yayasan Kartini. Anda akan menemukan apakah yayasan tersebut benar-benar menjalankan visi Kartini atau memiliki agenda kolonialnya sendiri (seperti mencetak istri pegawai pemerintah yang terdidik).

Tahap keempat, historiografi atau penulisan sejarah, merupakan tahap akhir di mana seluruh fakta dan interpretasi disusun menjadi narasi sejarah yang kronologis, analitis, dan kritis. Penulisan dilakukan dengan gaya bahasa akademis namun tetap komunikatif, dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah penulisan ilmiah.

Hasil

Latar Belakang, Aktivitas Sosial dan Pendidikan R.A. Kartini

Dalam sebuah ruang yang dibatasi tembok tinggi di Jepara, akhir abad ke-19, seorang perempuan muda duduk termangu memandang jauh melampaui dinding-dinding kayu rumah kabupatennya. Raden Ajeng Kartini, yang lahir pada 21 April 1879, adalah produk dari dunia yang penuh paradoks: putri Bupati Jepara Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dari istri pertamanya, Ngasirah, yang bukan berasal dari kalangan bangsawan tinggi. Latar belakang keluarganya yang kompleks ini mungkin menjadi benih pertama dari kepekaannya terhadap ketidakadilan baik dalam strata sosial maupun gender. Sebagai anak bangsawan Jawa di era kolonial, Kartini menikmati hak istimewa yang tidak dimiliki kebanyakan perempuan pribumi, termasuk kesempatan untuk bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS) hingga usia 12 tahun. Namun, justru pendidikan inilah yang kemudian menjadi pisau bermata dua ia membuka jendela dunianya ke horizon yang luas, sementara tradisi memaksanya untuk masuk ke dalam pingitan (*pingit*) tepat ketika ia mulai mengenal kebebasan berpikir (Marihandono dkk, 2016: 52-54).

Masa pingitan Kartini, yang berlangsung sejak usia 12 hingga 16 tahun, bukan sekadar isolasi fisik, melainkan sebuah penjara bagi pikiran yang sedang haus akan pengetahuan. Dalam kurun waktu itulah surat-suratnya—yang kelak akan menggetarkan dunia—mulai lahir. Kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda, terutama Stella Zeehandelaar, Rosa Abendanon, dan Annie Glaser, Kartini menuangkan seluruh gejolak jiwanya. Surat-suratnya bukan hanya keluhan tentang kebosanan, melainkan refleksi mendalam tentang kondisi perempuan Jawa, agama, modernitas, dan masa depan bangsanya. "Kami, gadis-gadis Jawa, dapatkah kami mengharapkan nasib yang lebih baik?" tanyanya dalam sebuah surat yang penuh kepedihan. Dalam kesendiriannya, justru di situlah dunia Kartini semakin meluas. Ia membaca habis-habisan: karya Multatuli, novel-novel feminis Eropa, majalah-majalah kebudayaan, dan tulisan-tulisan tentang emansipasi perempuan. Bacaan-bacaan ini memberinya bahasa untuk mengartikulasikan protes yang selama ini terpendam (Lembaga Studi reliano, 1992: 70).

Pemikiran Kartini tentang pendidikan terbentuk dari pengalaman pribadinya yang pahit dan observasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ia menyaksikan betapa perempuan-perempuan di

sekelilingnya, ibu-ibu, saudara-saudaranya yang perempuan, hidup dalam kebisuhan intelektual, dinikahkan muda, dan dipoligami tanpa memiliki hak untuk bersuara. Bagi Kartini, pendidikan bukan sekadar tentang membaca dan menulis, melainkan senjata untuk membebaskan diri dari belenggu kebodohan dan tradisi yang menindas. "Pendidikan, pendidikan, dan sekali lagi pendidikan!" serunya dalam salah satu suratnya. Namun, visinya tentang pendidikan perempuan tidak sekadar menjiplak model Barat. Kartini memiliki pemikiran yang sangat visioner tentang pendidikan yang memadukan nilai-nilai terbaik dari Eropa dengan kearifan lokal Jawa dan Islam. Ia membayangkan sebuah sekolah di mana perempuan Jawa tidak hanya belajar bahasa Belanda dan sains, tetapi juga menguasai keterampilan tradisional mereka sendiri, sebuah sintesis yang progresif namun tidak meninggalkan akar budaya (Lembaga Studi Reliano, 1992: 70).

Perjuangan Kartini untuk mewujudkan mimpinya dalam pendidikan tidaklah mudah. Setelah masa pingitannya berakhir, ia mulai mengambil langkah-langkah kecil namun signifikan. Bersama saudara-saudara perempuannya, Roekmini dan Kardinah, Kartini mendirikan sekolah kecil di teras rumah kabupaten Jepara. Sekolah ini awalnya sederhana, hanya untuk anak-anak perempuan dari kalangan priyayi, tetapi lambat laun berkembang. Yang revolusioner dari sekolah ini adalah metodenya Kartini menolak model pendidikan yang otoriter dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis, di mana anak didik diajak berpikir kritis dan kreatif. Surat kabar *De Locomotief* pada 1903 sempat meliput aktivitas pendidikan Kartini, menyebutnya sebagai "sebuah upaya yang patut dicatat dari putri bangsawan Jawa yang terpelajar." (Nugroho, 2007: 49)

Aktivitas sosial Kartini tidak terbatas pada pendidikan formal saja. Ia sangat concern dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Menyadari bahwa banyak perempuan Jawa memiliki keterampilan seni yang tinggi tetapi tidak memiliki akses pasar, Kartini mulai mempromosikan kerajinan ukir kayu khas Jepara ke tingkat yang lebih luas. Ia mendorong para pengrajin perempuan untuk tidak hanya membuat karya seni, tetapi juga memahami nilai ekonominya. Dalam banyak suratnya, Kartini berbicara tentang pentingnya kemandirian ekonomi bagi perempuan sebagai prasyarat untuk merdeka secara politik dan sosial. "Seorang perempuan harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri," tulisnya kepada Stella, "baru kemudian ia bisa menjadi mitra sejati bagi laki-laki." (Pane, 2008: 60)

Titik balik dalam hidup Kartini datang ketika ia memutuskan untuk menikah dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, pada 12 November 1903. Keputusan ini sering dilihat sebagai kompromi, tetapi sebenarnya lebih kompleks dari itu. Dalam surat-suratnya, Kartini menjelaskan bahwa suaminya mendukung visi pendidikannya dan mengizinkannya mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang. Justru dalam pernikahan inilah Kartini mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Sayangnya, waktu tidak berpihak padanya. Pada 17 September 1904, empat hari setelah melahirkan putra pertamanya, Kartini meninggal dunia di usia yang sangat muda 25 tahun. Kematiannya yang mendadak meninggalkan duka yang mendalam, tetapi semangatnya terus hidup melalui warisan pemikiran dan perjuangannya (Rachmah, 2013: 91).

Warisan Kartini yang paling abadi adalah kumpulan surat-suratnya yang dibukukan dengan judul *Door Duisternis tot Licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang) pada 1911, yang

dikumpulkan dan diedit oleh J.H. Abendanon. Buku ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi gerakan perempuan di Indonesia, tetapi juga mempengaruhi wacana tentang pendidikan dan emansipasi di tingkat internasional. Yang sering dilupakan adalah bahwa Kartini bukan hanya simbol, melainkan seorang pemikir yang konsep-konsepnya tentang pendidikan masih relevan hingga sekarang. Ia membayangkan pendidikan yang *holistic* yang tidak hanya mengembangkan intelektual, tetapi juga karakter, kreativitas, dan rasa percaya diri (Soemanto, 1999: 35).

Dalam konteks kekinian, kita sering memperingati Kartini dengan seremonial tanpa benar-benar memahami kedalaman pemikirannya. Kartini sebenarnya adalah pelopor *critical pedagogy* jauh sebelum Paulo Freire mempopulerkan konsep tersebut. Ia memahami bahwa pendidikan harus membebaskan, harus memanusiaikan, dan harus memberikan alat bagi yang tertindas untuk memahami dan mengubah realitas mereka. Sekolah yang didirikannya di Jepara dan Rembang adalah laboratorium di mana ia menguji teori-teori pendidikannya sebuah ruang di mana perempuan Jawa bisa belajar tanpa rasa takut, bisa bertanya tanpa dihukum, dan bisa bermimpi tanpa dibatasi (Sulastri, 2008: 80).

Aktivitas sosial Kartini juga menunjukkan pendekatan yang sangat modern ia tidak hanya memberikan bantuan karitatif, tetapi berusaha menciptakan sistem yang memberdayakan. Promosinya terhadap kerajinan ukir Jepara adalah contoh awal dari *social entrepreneurship* yang memadukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi. Pendekatannya yang multidimensi melalui pendidikan, ekonomi, dan budaya menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah ketidaksetaraan gender.

Namun, narasi tentang Kartini sering kali diputihkan dan diromantisasi. Kita harus ingat bahwa Kartini adalah produk dari zamannya—seorang perempuan yang bergumul dengan konflik internal antara tradisi dan modernitas, antara kewajiban sebagai bangsawan Jawa dan panggilan hati nuraninya sebagai manusia merdeka. Surat-suratnya memperlihatkan seorang Kartini yang utuh kadang ragu-ragu, sering kesepian, tetapi selalu berani dalam berpikir. Ia bukanlah sosok yang sempurna, dan justru dalam ketidaksempurnaannya itulah kita menemukan manusia seutuhnya (Jaquet, 2005: 62).

Dampak dari perjuangan Kartini terbukti nyata. Sekolah-sekolah Kartini yang pertama didirikan di Semarang (1912) dan kemudian menyebar ke kota-kota lain, meski seringkali mengalami distorsi dari visi awalnya. Yang lebih penting, semangat Kartini menginspirasi generasi perempuan Indonesia berikutnya dari Dewi Sartika di Bandung yang mendirikan Sekolah Keutamaan Isteri (1904) hingga organisasi perempuan seperti Putri Mardika (1912) yang secara terbuka memperjuangkan hak-hak perempuan (Hatley, 1990: 70).

Gagasan R.A. Kartini Tentang Pendidikan Kaum Perempuan

Di sebuah ruang tamu rumah kabupaten Jepara yang sepi, seorang perempuan muda dengan tatapan penuh kerinduan memandang jauh melampaui jendela, menembus batas-batas tembok yang mengurungnya. Raden Ajeng Kartini, dalam kesendiriannya yang terasa begitu dalam setelah dipingit pada usia 12 tahun, menemukan dunia lain melalui tinta dan kertas. Kepada sahabat penanya, Stella Zeehandelaar, ia menuangkan isi hatinya yang paling dalam: "Aduh, adakalanya hati ini merasa sesak, sesak sekali, Stella! Ingin rasanya aku melepaskan diri, terbang

tinggi-tinggi ke angkasa yang bebas." Keluhan ini bukan sekadar luapan emosi remaja belia, melainkan cerminan dari gejolak jiwa yang merasakan betapa tembok-tembok tradisi telah memenjarakan potensi dirinya sebagai perempuan. Dalam ruang pingitan itulah, justru pemikiran visioner tentang pendidikan perempuan mulai menemukan bentuknya sebuah paradoks yang indah dimana dari ruang terkungkung lahir gagasan-gagasan yang paling membebaskan (Cote, 2005: 10).

Pemahaman Kartini tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan berakar dari pengalaman personalnya yang pahit sekaligus istimewa. Sebagai putri bupati dari ibu yang bukan keturunan bangsawan tinggi, Kartini memiliki akses untuk mengenyam pendidikan di *Europeesche Lagere School* (ELS) hingga usia 12 tahun. Pengalaman bersekolah di ELS telah membukakan matanya pada dunia ilmu pengetahuan yang selama ini tertutup bagi kebanyakan perempuan pribumi. Ia belajar bahasa Belanda, sains, dan matematika pengetahuan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan priyayi laki-laki. Namun, tepat ketika otaknya sedang haus akan pengetahuan, tradisi memaksanya untuk masuk ke dalam pingitan, mengakhiri pendidikan formalnya. Pengalaman inilah yang membuat Kartini memahami secara langsung betapa pendidikan adalah hak dasar setiap manusia, termasuk perempuan, yang sering dirampas oleh adat dan tradisi yang kolot (Jaquet, 2005: 17).

Dalam surat-suratnya yang kemudian terkumpul dalam "Habis Gelap Terbitlah Terang", Kartini dengan tajam mengkritik sistem pendidikan yang ada pada masanya. Ia melihat bagaimana pendidikan untuk perempuan jika ada hanya terbatas pada penyiapan calon istri yang patuh. Perempuan diajari menari, menyulam, dan tata krama menghadapi suami, tanpa diberi akses kepada pengetahuan yang dapat mengembangkan akal budinya. Dalam sebuah surat kepada Ny. Abendanon-Mandri, Kartini menulis dengan nada pedih: "Pendidikan yang sekarang diberikan kepada putri-putri Jawa itu bukanlah pendidikan, melainkan suatu cara untuk membunuh akal budi mereka." Kritik Kartini ini bukan hanya terhadap sistem pendidikan kolonial, tetapi juga terhadap masyarakat Jawa yang telah membiarkan tradisi membelenggu potensi perempuan (Kartini, 2004: 57).

Visi Kartini tentang pendidikan perempuan sangatlah revolusioner untuk zamannya. Ia tidak hanya memimpikan perempuan bisa membaca dan menulis, tetapi juga memiliki akses kepada pengetahuan yang dapat membebaskan mereka dari belenggu kebodohan dan ketergantungan. Dalam suratnya yang terkenal, Kartini menyatakan: "Pendidikan, pendidikan, dan sekali lagi pendidikan! Hanya dengan pendidikan seorang perempuan dapat memperbaiki kedudukannya." Namun, yang membedakan gagasan Kartini dari pemikir feminis Eropa saat itu adalah penekanannya pada pendidikan yang tidak meninggalkan akar budaya. Ia membayangkan sebuah sintesis antara nilai-nilai terbaik dari Barat dengan kearifan lokal Jawa dan Islam (Pane, 2008: 60).

Gagasan pendidikan Kartini bersifat holistik dan multidimensional. Ia tidak hanya memikirkan pendidikan intelektual, tetapi juga pendidikan karakter, pendidikan ekonomi, dan pendidikan spiritual. Dalam praktiknya di sekolah yang didirikannya di Jepara dan kemudian di Rembang, Kartini menerapkan kurikulum yang mencakup berbagai aspek. Murid-muridnya tidak hanya belajar membaca dan menulis bahasa Belanda dan Melayu, tetapi juga matematika, ilmu

bumi, seni, dan keterampilan praktis seperti menjahit dan memasak. Namun, yang membedakan sekolah Kartini adalah pendekatannya yang humanis—ia menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dimana anak didik diajak untuk berpikir kritis dan kreatif, bukan hanya meniru dan menghafal (Pane, 2008: 60).

Aspek penting lain dari gagasan pendidikan Kartini adalah penekanannya pada pendidikan ekonomi bagi perempuan. Ia menyadari bahwa kemandirian ekonomi adalah prasyarat untuk mencapai kemerdekaan yang sejati. Dalam surat-suratnya, Kartini sering menyoroti pentingnya perempuan memiliki keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan. Di sekolahnya, ia tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik keterampilan yang dapat menjadi sumber penghidupan, seperti kerajinan tangan dan seni ukir khas Jepara. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman Kartini yang mendalam tentang akar masalah ketidaksetaraan—tanpa kemandirian ekonomi, perempuan akan selamanya tergantung pada laki-laki dan sulit mencapai emansipasi yang sejati (Djojonegoro, 1998: 54).

Pemikiran Kartini tentang pendidikan spiritual juga patut mendapatkan perhatian. Sebagai muslimah yang taat, Kartini memiliki pemahaman yang progresif tentang agama. Ia menolak penafsiran agama yang digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap perempuan. Dalam suratnya, Kartini menulis: "Agama harus menjaga kita dari berbuat dosa, tetapi agama tidak melarang orang bekerja untuk kecerdasan pikiran." Ia percaya bahwa pendidikan agama yang benar justru akan membebaskan perempuan, karena akan memberinya pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajibannya sebagai manusia yang setara di hadapan Tuhan.

Yang menarik dari gagasan pendidikan Kartini adalah kesadarannya akan pentingnya pendidikan dalam konteks yang lebih luas yaitu untuk kemajuan bangsa. Kartini melihat pendidikan perempuan tidak hanya untuk keuntungan individu, tetapi sebagai investasi untuk masa depan bangsa. Dalam salah satu suratnya, ia menulis dengan visioner: "Pendidikan perempuan adalah pendidikan bangsa, karena dari perempuanlah anak-anak belajar pertama kali. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Kartini telah memahami konsep *early childhood education* jauh sebelum istilah itu populer. Ia melihat bahwa perempuan yang terdidik akan menjadi ibu yang dapat mendidik generasi berikutnya dengan lebih baik, sehingga menciptakan siklus kemajuan yang berkelanjutan (Chudori, 2013: 77).

Perjuangan Kartini untuk mewujudkan gagasan-gagasan pendidikannya tidaklah mudah. Ia menghadapi tentangan dari berbagai pihak baik dari kalangan bangsawan Jawa yang menganggap pemikirannya terlalu radikal, maupun dari pemerintah kolonial yang skeptis terhadap pendidikan untuk "inlanders". Bahkan dalam keluarganya sendiri, Kartini harus berjuang untuk meyakinkan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Namun, dengan ketekunan dan diplomasi yang bijaksana, Kartini berhasil mendirikan sekolah pertama untuk anak perempuan di kompleks rumah kabupaten Jepara. Sekolah ini awalnya kecil, hanya untuk anak-anak perempuan dari kalangan priyayi, tetapi kemudian berkembang dan menjadi model bagi sekolah-sekolah perempuan di tempat lain (Chudori, 2013: 77).

Surat kabar *De Locomotief* dalam edisi 15 Maret 1903 melaporkan aktivitas pendidikan Kartini dengan nada kagum: "Sebuah upaya yang patut dicatat dari putri bangsawan Jawa yang

terpelajar, yang dengan gigih memperjuangkan hak perempuan pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak." Laporan ini menunjukkan bahwa perjuangan Kartini mulai mendapatkan perhatian dari kalangan yang lebih luas, termasuk media berbahasa Belanda. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, Kartini justru mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk mengembangkan gagasan pendidikannya. Suaminya mendukung sepenuhnya visi Kartini dan mengizinkannya mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang. Dalam suratnya kepada Ny. Abendanon, Kartini menulis dengan penuh semangat tentang rencana-rencananya untuk mengembangkan sekolah yang lebih besar dan terstruktur. Sayangnya, kematiannya yang mendadak pada usia 25 tahun menghentikan segala rencana besarnya (Pane, 2008: 90). Warisan terbesar Kartini mungkin adalah keteguhannya dalam memperjuangkan gagasan bahwa pendidikan adalah hak setiap perempuan, tanpa memandang status sosial. Dalam salah satu suratnya, Kartini menulis kata-kata yang terus bergema hingga sekarang: "Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi perempuan sepenuhnya." Pernyataan ini mengandung makna yang dalam—bahwa pendidikan tidak akan membuat perempuan kehilangan identitas femininnya, melainkan justru akan membuatnya lebih utuh sebagai manusia. Gagasan-gagasan pendidikan Kartini terus hidup dan berkembang setelah kematiannya. Sekolah-sekolah Kartini mulai bermunculan di berbagai kota, meski seringkali mengalami distorsi dari visi aslinya.

Yang lebih penting, semangatnya menginspirasi generasi perempuan Indonesia berikutnya untuk terus memperjuangkan hak atas pendidikan. Tokoh-tokoh seperti Dewi Sartika di Bandung yang mendirikan Sekolah Keutamaan Isteri pada 1904, dan organisasi perempuan seperti Putri Mardika pada 1912, jelas terinspirasi oleh perjuangan Kartini (Ananta Toer, 2003: 28).

Diskusi

Setelah wafatnya Raden Ajeng Kartini pada 17 September 1904, gagasan-gagasannya mengenai pentingnya pendidikan perempuan di Hindia Belanda tidak ikut terkubur bersamanya. Sebaliknya, pemikiran progresif yang tertuang dalam surat-surat Kartini justru menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh Belanda yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan masyarakat pribumi. Salah satu bentuk konkret dari penghormatan terhadap warisan intelektual Kartini adalah pendirian sekolah-sekolah perempuan pribumi yang dikenal dengan nama *Sekolah Kartini (Kartinschool)*, serta pembentukan Yayasan Kartini (*Kartini Stichting*) sebagai lembaga pendukung dan pengelolanya (Locher-Scholten, 2000).

Inspirasi utama pembentukan sekolah-sekolah Kartini berasal dari publikasi surat-surat Kartini dalam buku *Door Duisternis tot Licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang), yang disunting oleh J.H. Abendanon, Direktur Urusan Pendidikan, Agama, dan Kerajinan di Hindia Belanda. Abendanon adalah salah satu tokoh yang paling dekat dengan Kartini semasa hidupnya, terutama melalui korespondensi panjang yang mengungkapkan pemikiran Kartini mengenai ketidakadilan yang dialami perempuan Jawa, khususnya dalam bidang pendidikan. Abendanon merasa bahwa pemikiran Kartini tidak boleh hilang, dan perlu diwujudkan dalam bentuk nyata (Cote, 2005).

Setelah publikasi buku tersebut pada tahun 1911, gerakan simpatik terhadap Kartini meluas di kalangan masyarakat Belanda, baik di Hindia Belanda maupun di negeri Belanda sendiri. Pada tahun 1912, dibentuklah *Kartini Fonds* (Dana Kartini), yang berfungsi sebagai badan

penggalangan dana untuk membiayai pendidikan perempuan pribumi. Dana ini dikelola oleh kalangan elite Eropa dan Indo-Eropa yang memiliki kepedulian terhadap nasib perempuan di jajahan. Dana tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah yayasan resmi bernama *Kartini Stichting* yang bertugas mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah bagi anak perempuan pribumi di Hindia Belanda (Blackburn, 2004).

Sekolah pertama yang memakai nama *Kartinischool* didirikan pada tahun 1913 di Semarang, Jawa Tengah. Kota ini dipilih karena merupakan pusat kegiatan administrasi kolonial dan juga memiliki komunitas Eropa yang cukup besar dan progresif. Sekolah ini menerima murid perempuan dari kalangan priyayi dan pegawai negeri pribumi yang dianggap mampu mengikuti pendidikan formal berbahasa Belanda (Locher-Scholten, 2000). Sekolah Kartini kemudian didirikan juga di kota-kota lain seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Cirebon, dan Batavia, dan berkembang menjadi jaringan pendidikan perempuan yang cukup berpengaruh pada awal abad ke-20 (Wieringa, 1995).

Sekolah Kartini memiliki kurikulum yang cukup progresif untuk ukuran zamannya. Selain pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, sekolah ini juga mengajarkan pelajaran keterampilan rumah tangga (*haute couture*, memasak, dan menjahit), seni, serta etika dan kesehatan. Pelajaran diberikan dalam bahasa Belanda, dan sebagian besar guru merupakan perempuan Eropa atau Indo-Eropa yang terlatih. Namun, dalam perjalanannya, kurikulum sekolah ini dikritik karena terlalu menekankan nilai-nilai Eropa dan kurang memberikan ruang bagi budaya lokal serta pemikiran kritis yang diajarkan Kartini sendiri (Hatley, 1990).

Secara resmi, tujuan Sekolah Kartini adalah memberikan pendidikan yang layak bagi perempuan pribumi agar mereka dapat menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik dan mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai kebersihan, moral, dan keteraturan yang sejalan dengan proyek modernitas kolonial. Namun, bagi banyak kalangan, terutama para nasionalis pribumi, sekolah ini juga membuka peluang untuk mengembangkan emansipasi perempuan dan kesadaran akan hak-hak mereka sebagai individu (Blackburn, 2004).

Walaupun pendidikan yang diberikan masih terbatas pada kalangan elite, keberadaan Sekolah Kartini menjadi awal mula perubahan dalam sistem pendidikan kolonial. Ia memberikan legitimasi bagi pendidikan perempuan dalam tatanan yang selama ini meminggirkan mereka. Selain itu, Sekolah Kartini juga menjadi titik awal bagi lahirnya sekolah-sekolah perempuan pribumi yang lebih inklusif dan dikelola oleh masyarakat sendiri, seperti sekolah yang dikelola oleh organisasi keperempuanan pribumi seperti *Putri Mardika* atau *Aisyiyah* (Suryakusuma, 2011).

Meskipun dianggap sebagai terobosan, Sekolah Kartini tidak luput dari kritik. Beberapa tokoh pergerakan nasional menilai bahwa keberadaan sekolah-sekolah ini justru memperkuat hegemoni kolonial, karena hanya ditujukan bagi perempuan priyayi dan tidak menjangkau lapisan masyarakat bawah. Bahkan, dalam beberapa kasus, Sekolah Kartini dituduh sebagai alat politik etis Belanda untuk menjinakkan elite pribumi dengan memberikan sedikit akses terhadap pendidikan sambil mempertahankan struktur sosial yang tidak adil (Locher-Scholten, 2000).

Namun, di sisi lain, tokoh-tokoh perempuan Indonesia seperti Maria Ulfah Santoso, Soewarni Pringgodigdo, dan Dewi Sartika memanfaatkan kesempatan yang ada dalam sistem ini untuk memperluas peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Banyak dari mereka mendapatkan pendidikan awal di lembaga seperti Sekolah Kartini sebelum kemudian melanjutkan pendidikan atau bergabung dalam organisasi nasionalis (Wieringa, 1995).

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, banyak sekolah peninggalan kolonial, termasuk Sekolah Kartini, mengalami perubahan struktural dan kurikulum. Beberapa di antaranya diubah menjadi sekolah negeri, sementara yang lain digabungkan dengan sistem pendidikan nasional yang sedang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, nilai-nilai pendidikan perempuan yang digagas oleh Kartini tetap hidup dalam semangat gerakan pendidikan nasional, khususnya dalam agenda pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan (Ricklefs, 2008).

Yayasan Kartini sendiri mengalami transformasi. Di era Orde Baru, nama dan citra Kartini digunakan sebagai simbol resmi emansipasi perempuan, meskipun sering kali direduksi menjadi simbol ibu rumah tangga yang ideal menurut pandangan negara. Namun, beberapa yayasan dan institusi pendidikan yang terinspirasi oleh Kartini tetap menjalankan program pemberdayaan perempuan yang berbasis pada prinsip-prinsip awal yang diperjuangkan Kartini, yakni kesetaraan akses terhadap pendidikan dan pengembangan potensi perempuan (Suryakusuma, 2011).

SIMPULAN

Bahwa pelaksanaan Politik Etis di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menampilkan wajah yang paradoks. Di satu sisi, kebijakan yang lahir dari rasa "utang budi" ini memang membawa perluasan akses pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui pendirian berbagai jenjang sekolah, mulai dari *Volksschool* hingga perguruan tinggi seperti *Technische Hoogeschool te Bandung*. Namun, di balik kemajuan formal tersebut, politik etis dalam pendidikan justru menjadi alat stratifikasi sosial yang canggih. Sistem pendidikan sengaja dirancang berlapis-lapis sesuai dengan hierarki kolonial—sekolah terbaik dengan pengantar bahasa Belanda untuk anak Eropa dan elite pribumi, sementara pendidikan dasar terbatas untuk massa pribumi. Dampak yang muncul pun bersifat ganda: di satu sisi melahirkan elite intelektual pribumi yang kelak memimpin pergerakan nasional, tetapi di sisi lain justru memperlebar kesenjangan sosial dan menciptakan kasta pendidikan berdasarkan ras dan kelas sosial. Ironisnya, pendidikan Barat yang awalnya dimaksudkan untuk menciptakan tenaga administrasi rendahan yang loyal justru menjadi bumerang dengan melahirkan generasi yang mampu menggunakan alat-alat intelektual Barat untuk mengkritik dan melawan sistem kolonial itu sendiri. Warisan terbesar politik etis dalam pendidikan mungkin justru terletak pada kontradiksi inheren yang dikandungnya—sebuah sistem yang dirancang untuk melestarikan dominasi justru menjadi medium pembebasan melalui pengetahuan yang ditransmisikannya.

Bahwa pemikiran R.A. Kartini tentang pendidikan perempuan hadir sebagai suara pembebasan yang menyentuh relung paling dalam kehidupan perempuan Jawa di era kolonial. Melalui surat-suratnya yang penuh gairah intelektual, Kartini tidak hanya mengkritik praktik pingitan dan kawin paksa, tetapi merumuskan visi pendidikan yang holistik dan transformatif. Baginya, pendidikan bukan sekadar tentang melek huruf, melainkan senjata untuk membebaskan perempuan dari tiga penjara sekaligus: kebodohan, ketergantungan ekonomi, dan belenggu tradisi yang menindas. Yang membedakan Kartini dari pemikir feminis Eropa masa itu adalah kemampuannya membayangkan sintesis yang visioner antara modernitas Barat dengan kearifan lokal Jawa dan Islam. Ia memimpikan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan sains dan bahasa asing, tetapi juga memperkuat identitas kultural dan spiritual. Gagasan pendidikannya yang revolusioner terletak pada penekanan bahwa pendidikan perempuan adalah investasi bagi masa depan bangsa—perempuan terdidik akan menjadi ibu yang mampu mendidik generasi penerus yang lebih berkualitas. Dalam konteks ini, Kartini bukan hanya simbol emansipasi, melainkan seorang pemikir pendidikan yang konsep-konsepnya tentang pendidikan holistik, kesetaraan gender, dan pemberdayaan melalui pengetahuan masih sangat relevan hingga saat ini.

Bahwa keberadaan Yayasan Kartini dan sekolah-sekolah yang dikelolanya menjadi bukti nyata bagaimana sebuah ide dapat melampaui batas geografis dan kultural. Didirikan oleh perempuan-perempuan Belanda yang terinspirasi oleh surat-surat Kartini, yayasan ini berhasil mentransformasi pemikiran tertulis menjadi institusi pendidikan yang konkret. Sekolah-sekolah Kartini menawarkan pendekatan pendidikan yang unik—memadukan kurikulum akademis modern dengan penanaman nilai-nilai kemandirian dan kesadaran sosial. Dampak terbesarnya bukan hanya pada perluasan akses pendidikan formal bagi perempuan pribumi, melainkan pada terciptanya ruang sosial baru di mana perempuan Jawa dapat membentuk identitas modern tanpa harus meninggalkan sepenuhnya akar kultural mereka. Jaringan alumni sekolah Kartini menjadi semacam "komunitas intelektual" perempuan pertama di Jawa yang saling mendukung dalam memajukan pendidikan dan hak-hak perempuan. Namun, perjalanan yayasan ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi gerakan pendidikan perempuan di era kolonial—dari keterbatasan dana hingga resistensi dari kalangan tradisional. Meski secara kuantitatif jumlah sekolah dan lulusannya terbatas, pengaruh kualitatifnya sangat signifikan dalam membuka jalan bagi organisasi perempuan lain seperti Aisyiyah dan Wanita Utama. Keberadaan Yayasan Kartini membuktikan bahwa inisiatif akar rumput yang digerakkan oleh visi yang jelas dapat menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abendanon, J. H. (Ed.). (1911). *Door duisternis tot licht: Gedachten over en voor het Javaansche volk van Raden Adjeng Kartini*. 's-Gravenhage: G.C.T. van Dorp.
- Adriana, I. (2016). Pengaruh efikasi diri dan kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. *Prosiding Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika*, 539-548. Jakarta: Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Indraprasta PGRI.
- Ali, Sutan. (1981). *Perjuangan R.A. Kartini*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ananta Toer, Pramoedya. (2003). *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Arimbi, D. Ananda. (2009). *Reading Contemporary Indonesian Muslim Women Writers: Representation, Identity and Religion of Muslim Women in Indonesian Fiction*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Bachtiar, Harsja W. (2018). *Raja Ali Haji: Antara Kelisanan dan Keberaksaraan*. Jakarta: Kapustakaan Populer Gramedia.
- Blackburn, Susan. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. (2004). *Kongres Perempuan: Aktivis Perempuan Indonesia 1900-2000*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Chudori, Leila. S. (2013). *Gelap Terang Hidup Kartini*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Cote, Jorge. (2005). *Letters of a Javanese Princess: R.A. Kartini and the Discourses of Colonial Emancipation*. Leiden: KITLV Press.
- Darmawan, H. (2016). Pembelajaran berbasis konstruktivisme menggunakan media animasi dengan kerangka kerja TPCK dan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 6(1): 1-11. <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v6i1.747>
- De Locomotief*, "Onderwijs voor Inlandsche Meisjes," 15 Maret 1903.
- Djojonegoro, Widiachti. (1998). *Kartini: Pahlawan dan Pemikir Besar Emansipasi Perempuan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Hatley, Ben. (1990). *Indonesian Women and Political Activism*. Melbourne: Monash Asia Institute.
- Jaquet, Frits G.P. (2005). *Surat-Surat Adik Kartini*. Penerjemah Mia Bustam. Jakarta: Djambatan.

- Kartini, R. A. (2004). *Habis Gelap Terbitlah Terang* (Alih bahasa Armijn Pane). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Jilid 2, 1860-1888*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Katoppo, Aristides. (1990). *Satu Abad Kartini 1879-1979*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Keesing, Elisabeth. (1999). *Betapa Besarpun Sebuah Sangkar Hidup: Suratan dan Karya Kartini*. Jakarta: PT Djambatan.
- Lembaga Studi Realino. (1992). *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Leonard, L. (2013). Peran kemampuan berpikir lateral dan positif terhadap prestasi belajar evaluasi pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*, 32(1): 54-63. <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v5i1.1259>
- Locher-Scholten, E. (2000). *Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900–1942*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Lombard, Denys. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahayana, M. A. (2005). *Kartini dan Modernitas Awal Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ombak.
- Mangunwijaya, Y. B. (1991). *Sastra dan Religiositas Perempuan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marihandono, Djoko dkk. (2016). *Sisi Lain Kartini*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Munhanif, Ahmad. (2010). Islam and human rights in Indonesia: Politics and discourse. *Studia Islamika*, 17(1), 1–28. <https://doi.org/10.15408/sdi.v17i1.460>.
- Nagazumi, Akira. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme di Indonesia : Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Nugroho, Amran. (2007). *Emansipasi Wanita dan Perjuangan Kartini*. Surabaya: Mitra Media.
- Nurhidayat, Naufal. (2020). Pemikiran Kartini tentang pendidikan perempuan di masa kolonial: Relevansi dalam konteks pendidikan modern. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 8(2), 123–139. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpsi>
- Pane, Armijn. (2008). *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranoto, Suhartono W. 2003. Serpihan Budaya Feodal. Yogyakarta: Agastya Media
- Purwanto, Bambang. "The Dutch Colonial Policy on the Eve of the Twentieth Century." *Journal of Southeast Asian Studies* 37, no. 2 (2006): 293-311.
- Rachmah, Ismail. (2013). *Kartini dan Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M.C. (2006). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Rinaldi, Frans. (2018). R.A. Kartini dan emansipasi perempuan dalam perspektif sejarah. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(1), 65–78. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya>.
- Saptari, Ratna. (2000). Gendering the reformation: Kartini and the politics of the female body. *Jurnal Perempuan*, 16, 35–52.
- Shiraishi, Takashi. (1996). *Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa 1912-1916*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Sinar Hindia*. "Pendirian Sekolah Kartini." 15 April 1913
- Soemanto, Benny. (1999). *Sastra Feminis dan Kartini: Perspektif Kajian Gender*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemardjan, Selo. (1984). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: LP3ES.
- Sulastri, Emiliana. (2008). *Kartini dan Cita-Cita Pendidikan Perempuan*. Bandung: Rosda.
- Sumarni, Nani. (2005). *RA Kartini: Pahlawan Emansipasi Wanita Indonesia*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suryakusuma, Johan. (2011). *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sutrisno, Sulastin. (2014). *Emansipasi : Surat-surat kepada Bangsanya 1899- 1904*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Suryochondro, Sukanti. (2000). *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Tashadi. (1985). *R.A. Kartini: Sebuah Biografi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wieringa, Sharon. (1995). The politicization of gender relations in Indonesia: The Indonesian women's movement and the state. *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 29(2), 43–83.